

DWIFUNGSI ABRI DALAM SOSIAL POLITIK SEBAGAI GERAKAN AKAR RUMPUT PADA MASA ORDE BARU

Rona Meilani Purba¹, Henry Susanto², Yusuf Perdana³, Yustina Sri Ekwandari⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

E-mail korespondensi: yusuf.perdana@fkip.unila.ac.id

Received 15 Maret 2022

Accepted for publication 14 April 2022

Published 20 April 2022

Abstract

This research aims to determine the implementation of ABRI in the village in building community credibility and to find out ABRI's contribution to Golkar as a political machine. The method uses historical research methods or historical research, while the stages of historical research are Heuristics, Criticism, Interpretation and Historiography. The data that has been collected from the regional libraries and university libraries have been evaluated, verified and synthesized evidence to establish facts and draw conclusions. The results showed that: 1. The implementation of ABRI entering the village is very useful in accelerating development, both physical development and non-physical development for improving the economy and welfare of the community and serves as a means of strengthening national unity, overcoming difficulties that occur in the region and accelerating village development in an effort to maintain the integrity of the Unitary Republic of Indonesia. 2. ABRI's contribution to Golkar is seen in the political structure of ABRI and Golkar can be likened to a machine to perpetuate the New Order's power. Golkar is a political machine through general elections. The success achieved by Golkar in the election is the success achieved by ABRI in maintaining power.

Keywords: Dual Function, Social Politics, New Order Government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi ABRI masuk desa dalam membangun Kredibilitas masyarakat dan mengetahui Kontribusi ABRI dalam Golkar sebagai mesin politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Historis atau penelitian sejarah, adapun tahapan penelitian sejarah yaitu, Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Data-data yang berhasil dikumpulkan dari perpustakaan daerah serta perpustakaan universitas telah dievaluasi, diverifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Implementasi ABRI masuk desa ini sangat besar manfaatnya dalam rangka percepatan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan berfungsi sebagai sarana mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, mengatasi kesulitan yang terjadi didaerah serta percepatan pembangunan desa dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. 2. Kontribusi ABRI dalam Golkar dilihat dalam Struktur politik ABRI dan Golkar dapat diibaratkan sebagai mesin pelanggeng kekuasaan Orde Baru. Golkar merupakan mesin politik melalui pemilihan umum. Kesuksesan yang diraih Golkar dalam pemilu merupakan kesuksesan yang berhasil dilakukan ABRI dalam mempertahankan kekuasaan.

Kata Kunci: Dwifungsi, Sosial Politik, Pemerintahan Orde Baru

Pendahuluan

Pada masa awal kemerdekaan, TNI juga berperan besar dalam menumpas pemberontakan-an yang bermunculan di daerah-daerah Indonesia seperti pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948, pemberontakan G30S/PKI Tahun 1965, pemberontakan DI/TII, pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dan TNI juga tercatat pernah menganeksasi Timor-timor karena keadaan politik dan berpartisipasi menormalisasikan hubungan Indonesia Malaysia dan banyak pemberontakan lainnya.

Setelah masa jabatan Presiden Soekarno berakhir pada Tahun 1967, akibat dari pemberontakan G30S/PKI yang membuat dirinya dilengserkan dalam sidang MPRS Tahun 1966 (Crouch, 1999:225). TNI memasuki era baru yaitu masa kepemimpinan Jenderal Soeharto. Pada tanggal 20 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan Pemerintahan kepada Jenderal Soeharto, Pemegang mandat Supersemar (Nasution dalam Fattah, 2005: 132).

Supersemar menjadi batu loncatan bagi Jendral Soeharto untuk mengambil kekuasaan dari Soekarno dan memimpin pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Orde Baru yang lahir secara dramatis pada Tahun 1966, ketika bangsa Indonesia mengalami suatu perubahan orientasi yang luar biasa disegala bidang baik dalam bidang politik, ideologi, ekonomi maupun sosial dan kebudayaan. Dalam konteks ini, kelompok TNI-AD (Tentara Nasional-Angkatan Darat) dibawah pimpinan Jenderal Soeharto, secara bertahap menerima pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno dan mulai menata kembali masyarakat Indonesia. (Milne Andi dalam Suwirta. 2018:14).

Dibawah kepemimpinan Orde Baru, TNI memiliki Dwifungsi yang diakibatkan oleh adanya kebijakan Jenderal Soeharto, salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah adanya keterlibatan militer dalam fungsinya sebagai kekuatan sosial dalam upaya membangun bangsa, konsep ini lebih dikenal dengan Dwifungsi ABRI (Samego, 1998:59). Dwi-fungsi ABRI yaitu sebagai kekuatan Hankam (Pertahanan dan Keamanan) dan fungsi ke-kuatan Sosial Politik, yang sangat berperan penting dalam mewujudkan stabilitas nasional yang menetap dan dinamis disegala aspek kehidupan bangsa, dalam rangka untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan pancasila. Lahirnya konsep Dwifungsi ABRI digagas oleh A.H Nasution pada 12 November 1958 dan baru benar-benar diterapkan pada era Orde Baru karena Nasution sendiri merupakan pen-diri dari IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) untuk memberikan kesempatan kepada Tentara atau militer berpolitik (Mabes ABRI dalam Fattah, 2005:144).

Pada masa kepemimpinan Jenderal Soeharto Dwifungsi ABRI bukan hanya berperan sebagai militer saja tetapi Dwifungsi ABRI juga dijadikan alasan ikut sertanya ABRI ke

dalam semua aspek kehidupan bernegara (Ma-rin dalam Fattah, 2005:138). Dalam hal tersebut Dwifungsi ABRI dimanfaatkan oleh Jenderal Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya, dimana Jenderal Soeharto selaku pemimpin militer berupaya menggunakan suatu organisasinya dalam melaksanakan pemilihan umum (pemilihan umum) guna memperkuat dan mempertahankan kepentingan dan kedudukan tentara dalam pemerintahan. Partai Golkar (Golongan Karya) merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Partai Golkar (Golongan Karya) berdiri sejak berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Munculnya partai Golkar sebagai kekuatan baru sering dianggap sebagai kekuatan Orde Baru karena dalam kekuatan ini Golkar didukung oleh tiga kekuatan dominan Orde Baru, yaitu :

1. ABRI sebagai kekuatan kunci untuk melakukan tekanan atas kekuatan sipil yang mencoba mengganggu eksistensi Golkar.
2. Birokrasi dalam hal ini dibentuknya korps-mendagri (Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri) sebagai cikal bakal munculnya "monoloyalitas" yang berarti kesetiaan tunggal terhadap suatu perkumpulan, negara dan sebagainya. Golkar akhirnya dikukuhkan melalui KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia).
3. Golkar dijadikan alat "Orde Baru" untuk melanggengkan kekuasaannya melalui formulasi yang dianggap demokratis dengan tata cara dan prosedur pemilihan umum, sidang umum MPR dan dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat (Sundhaussen, Ulf. 1986:32)

Untuk menghadapi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 20 Oktober 1964 terbentuklah Sekber-Golkar (Sekertariat Bersama Golongan Karya). Organisasi yang dipilih oleh Jenderal Soeharto untuk mempertahankan dan memperkuat kedudukan tentara jatuh pada Sekber-Golkar (Sekretariat Bersama). Pembentukan Sekber-Golkar bermanfaat bagi sebagian masyarakat Indonesia, karena organisasi Sekber-Golkar bertujuan untuk memajukan kondisi pembangunan sosial-ekonomi Indonesia pada saat itu. Selain itu tujuan dari organisasi Sekber-Golkar dipandang sejalan dengan tuntunan pemikiran politik waktu itu yang membutuhkan tampilnya kekuatan sosial-politik yang setia pada amanat penderitaan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila (Nisa dkk, 2017:143).

Melihat besarnya peran ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru yang tidak hanya berperan dalam bidang kemiliteran. Namun, ABRI juga berperan besar pada bidang Hankam (Pertahanan dan Keamanan) dan Sosial Politik. Pada bidang Hankam ABRI tercatat pernah beberapa kali ikut dalam pemberantas pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948, pemberontakan G30/SPKI Tahun 1965, pemberontakan DI/TII, pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dan TNI

juga tercatat pernah menganeksasi Timor-timor, karena keadaan politik dan berpartisipasi menormalisasikan hubungan Indonesia-Malaysia, dan pogram ABRI masuk desa Sedangkan, dalam bidang Sosial Poitik banyak perwira-perwira ABRI terutama dari Angkatan Darat yang duduk pada jabatan strategis dipemerintahan demi melang-gengkan rezim Pemerintahan Orde Baru. Se-hingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi ABRI dalam Sosial Politik pada masa Orde Baru”.

Metode

Penelitian yang digunakan dalam peneliti-an ini menggunakan metode penelitian historis atau penelitian sejarah, sebagaimana yang di-kemukakan oleh (Suryabarata, 1998:16), me-nyatakan bahwa metode historis adalah suatu usaha yang dilakukan untuk merekonstruksikan masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, meng-evaluasi, menverifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan.

Penelitian dengan menggunakan metode historis menurut (Daliman 2012 : 28-29), terdiri dari empat tahapan yaitu :

1. Heuristik adalah kegiatan menghimpun sumber-sumber sejarah.
2. Kritik (verifikasi) adalah meneliti apakah sumber-sumber itu sejati, baik bentuk maupun isinya.
3. Interpretasi adalah tahapan untuk menetapkan makna dan saling- hubungan dari fakta-fakta yang telah diverifikasi.
4. Historiografi adalah penyajian hasil sintesis yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah sejarah.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, yakni teknik dalam pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian, dimana pe-neliti melalui studi pustaka melakukan kajian yang berkaitan tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian melalui literatur-literatur maupun artikel terkait yang peneliti dapat.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil pengumpulan data yang telah penulis lakukan. Penulisan sebuah kronologi sejarah diperlukan ketelitian dalam menunjukkan kebenaran. Data yang sudah terkumpul

diharapkan mampu menjawab permasalahan sesuai dengan apa yang telah difokuskan. Peneliti telah meng-analisis data berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti tentukan. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Eksistensi ABRI Dalam Sosial Politik Pada Masa Peme-rintahan Orde Baru.

Implementasi ABRI Masuk Desa dalam Membangun Kredibilitas Masyarakat. Dari Tahun 1980, ABRI berusaha men-duduki posisi sentral dalam pembangunan desa dan melancarkan satu kebijakan bernama ABRI masuk desa. Ini merupakan program aksi kewarganegaraan yang bertujuan untuk men-dorong pembangunan, untuk pertahanan posisi sentral ABRI, dan untuk mendapatkan duku-ngan rakyat terhadap militer. Kelompok-kel-ompok prajurit memperbaiki jembatan dan sumur, membetulkan jalan, membangun rum-ah-rumah ibadah dan klinik kesehatan, dan melakukan indoktinasi pancasila. Militer secara terus menerus menekankan suatu peranan bagi dirinya sendiri yang berekonsentrasikan pada isu-isu dalam negeri, karena tidak ada lagi sumber ancaman berbahaya dari luar terhadap Indonesia.

Proses pembangunan masyarakat seperti Tentara Manunggal Membangun Desa (TM-MD) ini dapat ditinjau dari sisi partisipasi atau keterlibatan masyarakatnya. Partisipasi masya-rakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat seperti Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ini meliputi identifikasi potensi, permasalahan yang ada di masyarakat, penguasaan program berdasarkan kebutuhan lokal, implementasi dalam pelaksanaan dan penga-wasan. Peran serta masyarakat dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TM-MD) ini yaitu dalam bentuk partisipasi ide dan kontribusi tenaga, dimana terlaksananya prog-ram berawal dari kebutuhan dan permasalahan dilingkungan masyarakat setempat.

Militer dapat membantu mengembangkan ekonomi, mengajarkan pendidikan kewarga-negaraan dan mengukuhkan dominasinya ter-hadap berbagai isu nasional. Ketika penduduk lokal mulai menunjukkan kepentingan dan aspirasi yang berbeda dengan prioritas ABRI, ABRI siap menggunakan tindakan kekerasan untuk tanpa kenal ampun menumpas para disi-den. Dibalik pendekatannya, ABRI menyimpan rasa “lebih mulia” atas penduduk desa yang terbelakang dan atas kaum sipil secara umum, hal mana merupakan bagian

tak terpisahkan dari kultur ABRI (M.C. Ricklefs, 2005: 605).

Kontribusi ABRI Dalam Golkar Sebagai Mesin Politik. Pada masa Orde Baru dibawah kekuasaan Presiden Soeharto, ada sebuah istilah yang lahir dari proses politik dominasi militer dan birokrasi, atau yang disebut sebagai "Jalur ABG". Jalur ABG adalah sebuah istilah yang digunakan oleh kelompok intelektual dalam menyebut unsur atau komponen politik dalam proses dan struktur pemerintahan Indonesia di masa Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, yaitu Militer (ABRI), Birokrasi, dan Golkar. Ketiga unsur politik itu menjadi yang paling dominan dalam pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun (Marijan, 2010:2). Peran ABRI pada Munas I Golkar tahun 1973 sangatlah besar baik sebagai alat pengamanan, juga sebagai alat dukungan politis untuk menegakkan kewibawaan Golkar di mata partai-partai lain. Dukungan lain juga diberikan dalam hal yang bersifat kelembagaan, yakni dengan terintegrasinya seluruh keluarga besar ABRI (KBA) kedalam jajaran pendukung utama Golkar dalam setiap Pemilu (Syamsudin Haris, 1991:4)

Kontribusi ABRI dalam Golkar dilihat dalam, Struktur politik yang terbangun di masa Orde Baru dapat dikatakan bahwa hubungan ABRI dan Golkar tak terpisahkan. Hal ini dapat dipahami karena ABRI-lah yang mem-bidani lahirnya Golkar. ABRI dan Golkar dapat diibaratkan sebagai mesin pelanggeng kekuasaan Orde Baru. Golkar merupakan mesin politik melalui pemilihan umum. Kesuksesan yang diraih Golkar dalam pemilu merupakan kesuksesan yang berhasil dilakukan ABRI dalam mempertahankan kekuasaan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil data-data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi ABRI masuk Desa dalam membangun kredibilitas masyarakat yaitu dapat dilihat dari Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ini sangat besar manfaatnya dalam rangka percepatan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Program TM-MD merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan baik di perdesaan maupun diwilayah kumuh perkotaan dan merupakan perekat penguatan integrasi Bangsa pada daerah perbatasan antar Negara dan pulau-pulau terluar, dan

program TMMD berfungsi sebagai sarana mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, mengatasi kesulitan yang terjadi didaerah serta percepatan pembangunan desa dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Kontribusi ABRI dalam Golkar dilihat dalam, Struktur politik yang terbangun di masa Orde Baru dapat dikatakan bahwa hubungan ABRI dan Golkar tak terpisahkan. Hal ini dapat dipahami karena ABRI-lah yang mem-bidani lahirnya Golkar. ABRI dan Golkar dapat diibaratkan sebagai mesin pelanggeng kekuasaan Orde Baru. Golkar merupakan mesin politik melalui pemilihan umum. Kesuksesan yang diraih Golkar dalam pemilu merupakan kesuksesan yang berhasil dilakukan ABRI dalam mempertahankan kekuasaan.

Referensi

- Crouch Harold. 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Daliman A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Fattah Abdoel. 2005. *Demiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Jakarta: LKIS.
- Indria Samego, dkk, 1998. *Desakan Kuat Reformasi Atas Konsep Dwifungsi ABRI*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI.
- Kacung Marijan. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta : Kencana.
- Noviah Iffatun Nisa dkk. 2017. Strategy of Golongan Karya to be Winner in Election Year 1971-1997. *Jurnal Historica*. Vol 1 (1).
- Samego Indria. 1998. *Bila ABRI Berbisnis*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Sumardi Suryabarata. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwifungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES
- Suwirta, Andi. 2018. Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung 1966-1974. *Mimbar Pendidikan*. Vol. 3 (114).
- Syamsudin Haris. 1991. *Politik Orde Baru*. Jakarta: Grasindo